

## Analisis Framing Pemberitaan Kawal Putusan MK pada *Kompas.com*

Cintya Dewi Sartika\*, Dadang S. Anshori, Encep Kusumah

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

\*cintyadewi@upi.edu

### Abstract

*This research is motivated by the importance of using precise and unambiguous language so that it can be well understood by the public. The data of this study were taken from political news uploaded by Kompas.com during August 21-23, 2024 related to the Constitutional Court's decision Number 70/PUU-XXII/2024 regarding the minimum age limit for regional head candidates. The aim is to analyze the media framing in reporting the issue using the Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki framing analysis model. The results of the analysis found several terms that describe uncertainty and critical terms to emphasize the social impact of dynastic politics and political interests that benefit certain parties. Uncertainty is a framing raised by Kompas.com to form a narrative of transparency related to the unfinalized legal process and create a discourse of public supervision highlighted through the "Kawal Putusan MK" narrative. The reaction of public protests is an important consideration, especially for Kompas.com, which can strengthen the narrative of political favoritism carried out by the DPR, which is considered to open the way for dynastic politics for Kaesang, who has prepared himself by taking care of the letters related to the requirements for the 2024 Pilkada candidates.*

**Keywords:** *Framing Analysis; Political News; Uncertainty Constitutional Court Decision; Pan and Kosicki Framing Model*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pentingnya penggunaan bahasa yang tepat dan tidak ambigu sehingga dapat dipahami dengan baik oleh publik. Data penelitian ini diambil pada berita politik yang diunggah Kompas.com dalam kurun waktu 21-23 Agustus 2024 terkait putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal batas usia minimal calon kepala daerah. Tujuannya untuk menganalisis framing media dalam memberitakan isu tersebut menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Dari hasil analisis ditemukan beberapa istilah yang menggambarkan ketidakpastian dan istilah-istilah kritis untuk menekankan dampak sosial akan adanya politik dinasti dan kepentingan politik yang menguntungkan pihak tertentu. Ketidakpastian merupakan framing yang dimunculkan oleh *Kompas.com* untuk membentuk narasi transparansi terkait proses hukum yang belum final dan menciptakan wacana pengawasan publik yang disorot melalui narasi Kawal Putusan MK. Reaksi protes masyarakat menjadi pertimbangan penting khususnya untuk *Kompas.com* yang dapat memperkuat narasi akan adanya keberpihakan politik yang dilakukan oleh DPR yang dinilai membuka jalan politik dinasti bagi Kaesang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan mengurus surat-surat yang terkait dengan persyaratan calon Pilkada 2024.

**Kata Kunci:** *Analisis Framing; Berita Politik; Ketidakpastian Putusan MK; Framing Model Pan & Kosicki*

### Pendahuluan

Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam pemberitaan, khususnya berita dengan isu politik atau hukum. Penggunaan bahasa yang tepat dan tidak ambigu dapat menentukan bagaimana suatu isu dapat dipahami oleh publik. Ambigu merupakan sifat

dari konstruksi bahasa baik kata, frasa atau kalimat yang memiliki lebih dari satu makna tafsiran atau interpretasi (Bustam, 2020). Bahasa yang seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian, namun kenyataannya sering kali memunculkan ambiguitas. Ketidakpastian yang muncul dari penggunaan bahasa seringkali dimanfaatkan media massa untuk membingkai berita politik atau hukum. Artinya ketidakpastian yang dimunculkan dapat menciptakan realitas tergantung pilihan kata dan cara penyajiannya. Dengan demikian, pemilihan kata dan cara penyajian suatu berita ikut membentuk makna yang dipersepsikan publik serta cara publik memahami suatu peristiwa (Sarihati et al., 2019). Berita yang disampaikan oleh media massa tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memframing suatu isu, sehingga memengaruhi cara pandang masyarakat dan mengevaluasi isu politik secara tidak langsung (Newton & Deth, 2023). Entman (1993) menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk memilih sudut pandang tertentu tentang bagaimana suatu isu diberitakan. Berita politik atau hukum cenderung diframing oleh media dengan fokus pada kontroversi atau dampak sosial-politik (Berger & Luckmann, 2021; Dwinarko, 2022).

Berita hukum yang kompleks seringkali disederhanakan menjadi narasi yang lebih mudah dipahami publik. Dengan demikian, media tidak hanya berperan menyampaikan suatu informasi, tetapi juga membentuk persepsi publik dari narasi yang kontroversi yang menarik, namun bisa saja mengorbankan pemahaman yang lebih tentang hukum itu sendiri. Isu politik yang akhir-akhir ini menarik perhatian media yaitu pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait dengan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya soal batas usia minimal calon kepala daerah. Keputusan ini langsung menuai kontroversi di berbagai lapisan masyarakat.

Kemarahan masyarakat juga dipicu oleh adanya dugaan bahwa keputusan MK membuka jalan bagi politik dinasti, termasuk bagi Kaesang anak bapak presiden Jokowi yang berniat mencalonkan diri dalam politik tetapi belum tepat 30 tahun. Penolakan terhadap putusan ini menyebabkan kurang lebih 10.000 masyarakat melakukan demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Aksi protes juga dilakukan di media sosial, khususnya X dan *Instagram*. Masyarakat beramai-ramai memasang foto 'Peringatan Darurat' dan memakai tagar *#KawalPutusanMK* yang diunggah lebih dari 1 juta postingan. Media merupakan kunci dalam membentuk persepsi publik terkait keputusan hukum. Tanpa media, publik mungkin tidak akan mengetahui detail keputusan hukum ataupun dampaknya terhadap masyarakat. Tanpa didukung pemberitaan oleh media, tagar *#KawalPutusanMK* mungkin tidak akan berpengaruh besar dan tidak ada partisipasi aktif publik dalam mengkritisi putusan MK. Penekanan media terhadap potensi adanya kepentingan elite politik dalam putusan MK ini, terutama karena nama Kaesang sering disebut-sebut, menunjukkan bagaimana media dapat membingkai sebuah keputusan hukum dengan menyoroti aspek yang dapat menimbulkan respon emosional dari publik. Pengemasan berita yang menarik, akan dapat memengaruhi masyarakat (Wulandari, 2021).

Opini publik terkait isu politik yang terbentuk dalam masyarakat akan memengaruhi jalannya proses politik. Ketika bingkai suatu media berhasil membentuk sebuah opini publik yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dalam hal ini putusan DPR yang dianggap membuka jalan untuk politik dinasti, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar masyarakat menyetujui isu politik terkait opini media tersebut (Sarihati et al., 2019). Semakin kuat media membingkai suatu isu yang cocok dengan pola pikir atau perasaan publik, semakin kuat juga kemungkinannya untuk memengaruhi banyak khalayak untuk berpikir dan merasakan hal yang sama isu yang disampaikan tersebut (Dwinarko, 2022).

Di balik ketegangan sosial ini, beberapa media massa cenderung menghindari pembahasan isu-isu politik yang dianggap sensitif. Namun, Kompas.com muncul sebagai platform berita mengkritik kebijakan pemerintahan dan menyuarakan ketidakpuasan publik. Keberanian *Kompas.com* juga membuahkan hasil dengan berhasil mendapat urutan paling pertama dari Laporan Reuters Institute mengungguli (69%) CNN yang mendapat (68%) sebagai media yang paling dipercaya untuk pertama kalinya sejak Digital News Report mulai melakukan penilaian pada tahun 2021 (Digital News Report, 2024). *Kompas.com* menarik perhatian masyarakat karena menciptakan fenomena unik di media sosial X karena berhasil trending dengan kategori makanan.

Kompas disebut-sebut sedang memasak melalui pemberitaannya yang kritis pada isu Kawal Putusan MK. Fenomena ini menciptakan ruang diskusi yang melibatkan berbagai lapisan Masyarakat dengan framing yang fokus pada pengawasan putusan MK yang kontroversial. Hal ini menjadikan framing bukan sekadar proses pembingkai biasa, namun dapat menjadi senjata keberpihakan media pada politik tertentu (Dzulfikar et al., 2021). Framing yang dilakukan media melalui pemilihan kata, struktur kalimat dan penekanan aspek tertentu yang memperkuat atau menimbulkan ketidakpastian dalam memahami suatu keputusan hukum. Analisis framing merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi wacana berita, khususnya dalam melihat bagaimana isu-isu kebijakan politik dirancang oleh media (Pan & Kosicki, 1993; Dwinarko, 2022).

Framing dilakukan media dengan memilih satu isu dan mengabaikan isu lainnya agar masyarakat tertuju pada satu isu yang ditonjolkan dengan berbagai strategi wacana, seperti penggunaan *headline*, pengulangan, pemakaian label tertentu, pemakaian grafis dan lain-lain (Eriyanto, 2002). Konsep framing digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek sebuah realitas yang ingin ditonjolkan suatu media. Penonjolan dari aspek tertentu harus dicermati secara mendalam. Penekanan aspek tertentu akan membuat bagian tertentu lebih bermakna, mudah diingat dan mengena di benak khalayak (Sobur, 2001). Analisis framing sebelumnya telah dilakukan oleh Zahra Febriyanti dan N.R Nadya Karina pada tahun 2021 dengan judul Konstruksi Berita CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Solo 2020, Analisis Framing Perspektif Zhongdan Pan - Gerald M Kosicki.

Ditemukan dalam penelitian ini bahwa CNN cukup dominan pada keberpihakan media dan tidak netral dalam memberitakan berita Gibran pasca Pilkada 2020. Penekanan pesan disampaikan dengan menampilkan sesuatu yang unik dan menarik. Penelitian ini berfokus pada analisis framing pemberitaan putusan MK pada *Kompas.com* dengan menggunakan model Pan & Kosicki. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih kritis bagaimana *Kompas.com* memanfaatkan bahasa untuk membingkai ketidakpastian suatu isu menjadi berita yang mempunyai peran penting dalam membentuk opini publik terkait keputusan hukum. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi apakah *Kompas.com* sebagai media paling dipercaya di Indonesia, menyajikan berita yang netral, menentang kebijakan dan memihak masyarakat atau justru memberikan ruang untuk kepentingan tertentu.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa 5 berita dari *Kompas.com* dalam kurun waktu 21-23 Agustus 2024 yang membahas isu kawal putusan MK terkait penurunan usia calon Kepala Daerah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan membaca, mencermati dan mendokumentasikan pemberitaan terkait putusan MK laman web di *Kompas.com* yang merupakan sumber utama data. Peneliti berperan aktif dalam proses ini dengan mengamati langsung teks berita yang dipilih, mencatat data yang relevan, dan melakukan

analisis secara mendalam. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis framing model Zhongdang Pan & Gerald, Kosicki. Model Pan & Kosicki memiliki 4 komponen analisis, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Model ini memungkinkan penelitian untuk menggali lebih jauh bagaimana struktur bahasa digunakan untuk membangun narasi tertentu dalam pemberitaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola framing yang digunakan Kompas.com dalam menggambarkan isu pengawalan putusan MK, dengan fokus pada bagaimana elemen bahasa memengaruhi persepsi publik tersebut.

Table 1. Kerangka Framing Pan & Kosicki

Struktur	Perangkat framing	Unit yang Diamati
Sintaksis (Cara wartawan menyusun berita)	1. Skema berita	Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan dan penutup.
Skrip (Cara wartawan mengisahkan fakta)	2. Kelengkapan berita	5W+1H
Tematik (Cara wartawan menuliskan berita)	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk kalimat 6. Kata ganti	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar- kalimat.
Retorik (Cara wartawan menekankan fakta)	7. Leksikon 8. Metafora 9. Grafis	Kata, idiom, gambar/foto.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis berita-berita yang diterbitkan Kompas.com periode bulan Agustus. Rincian berita yang dianalisis sebagai berikut.

Tabel 2. Judul Berita Isu Kawal Putusan MK pada *Kompas.com* Edisi Bulan Agustus

Tanggal Terbit	Judul Berita
21 Agustus 2024	DPR Manut MA dan Tolak MK soal Usia Cagub, Angin Segar untuk Kaesang
22 Agustus 2024	Putusan MK Untungkan Gibran Diikuti, yang Rugikan Kaesang Diakali
22 Agustus 2024	DPR Tolak MK Soal Usia Cagub Pilkada 2024, Ternyata Segini Umur Kaesang
22 Agustus 2024	DPR Anulir Putusan MK Dinilai untuk Buka Jalan Kaesang di Pilkada Jateng
23 Agustus 2024	Kaesang Urus Surat untuk Pilkada pada 20 Agustus, Saat MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Sumber: *Kompas.com* (2024)

Pembingkai berita dilakukan dengan menganalisis judul berita, foto yang ditampilkan, narasumber, dan isi beritanya. Aspek yang ditonjolkan oleh *Kompas.com* sangat tampak pada judul-judul berita yang diunggah. Berikut analisis framing berita Putusan MK dalam Kompas.com menggunakan Model Pan & Kosicki.

## 1. Framing Berita 1 Berjudul DPR Manut MA dan Tolak MK soal Usia Cagub, Angin Segar untuk Kaesang

### a. Sintaksis

Judul berita DPR Manut MA dan Tolak MK menggambarkan sikap pasif DPR yang memilih mengikuti keputusan MA yang seolah-olah tidak mematuhi hierarki hukum yang benar, karena menciptakan kesan bahwa DPR mendukung Kaesang. Lead berita menekankan bahwa keputusan MA dibuat dengan waktu yang sangat singkat dan tergesa-gesa. Latar informasi berupa kutipan dari anggota DPR yang pro dan kontra dihadirkan untuk memperkuat narasi bahwa adanya konflik internal dan memperkuat framing bahwa adanya kepentingan tertentu yang dipandang kontroversial. Artikel berita ditutup dengan menyoroti keputusan akhir seperti apa yang akan diambil KPU (Penyelenggara Pemilu) disebut bola panas untuk mempertahankan ketertarikan pembaca. Hal ini mengarahkan pembaca untuk melihat keputusan tersebut dalam bingkai legitimasi yang mempertanyakan keputusan ini untuk kepentingan umum atau kepentingan pribadi.

### b. Skrip

Skrip pada berita 1 secara keseluruhan telah memuat 5W+1H. Berikut analisisnya.

Tabel 3. Analisis Skrip Pada Berita 1

Komponen	Hasil Analisis
Skrip	<p><i>What:</i> DPR menolak putusan MK terkait usia calon kepala daerah dan memilih mengikuti putusan MA.</p> <p><i>Who:</i> MK, MA, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR, KPU, Kaesang Pangarep, fraksi-fraksi DPR (PDI-P), Anthony Lee, Fahrur Rozi.</p> <p><i>Where:</i> Gedung DPR.</p> <p><i>When:</i> 21 Agustus 2024</p> <p><i>Why:</i> DPR menganggap putusan MA sebagai pilihan politik yang bisa diterima.</p> <p><i>How:</i> DPR mengambil keputusan dalam waktu singkat.</p>

### c. Tematik

Informasi yang disajikan cukup detail, terutama berkaitan dengan proses keputusan DPR dan perbedaan pandangan dengan MK. Fokus utama setiap paragraf mendukung narasi utama yaitu bahwa keputusan DPR berpotensi menguntungkan Kaesang dan menentang prinsip konstitusi yang diwakili MK. Sebagian besar kalimat ditulis dengan kalimat pasif yang menggambarkan bingkai moralitas karena dinilai melanggar nilai-nilai keadilan, seperti DPR memilih mengikuti putusan MA atau Baleg DPR menolak putusan MK. Kalimat tersebut memberikan makna bahwa DPR hanya memilih keputusan yang menguntungkan politik tertentu. Kata ganti sebutan DPR atau mereka menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan mayoritas, bukan individu. Hal ini memperkuat framing bagaimana keputusan yang dibuat berpotensi membuka jalan untuk politik dinasti.

### d. Retoris

Beberapa istilah yang memunculkan ketidakpastian ditemukan dalam artikel ini, seperti dalam kalimat Situasi ini menjadi angin segar untuk putra bungsu Presiden Joko

Widodo Kaesang Pangarep yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024 istilah digadang-gadang dimunculkan untuk menyoroti bahwa pencalonan Kaesang ini merupakan sesuatu yang baru saja diwacanakan. Istilah lain seperti, seandainya dan bisa saja juga dimunculkan agar pembaca merasa belum ada kepastian dalam putusan ini, bahwa pencalonan Kaesang bisa saja berhasil ataupun gagal. Penggunaan kata-kata yang dimunculkan agar mempengaruhi emosi pembaca, seperti manut, kontroversial dan angin segar kata-kata ini memiliki makna bingkai legitimasi yang negatif tentang keputusan DPR yang menyiratkan keberpihakan pada Kaesang Pangarep.

Kata membebek pada Baidowi cs memperkuat retorika keberpihakan KPU pada keputusan yang tidak tepat. Frasa hanya dalam tempo tiga hari dan keputusan diambil hanya dalam hitungan menit digunakan untuk memberi kesan bahwa keputusan dibuat secara buru-buru dan tidak matang. Frasa angin segar untuk Kaesang menyoroti keuntungan politik dinasti. Frasa bola panas ada di tangan KPU menggambarkan bahwa keputusan KPU sangat penting dan memberikan kesan dramatis. Frasa tersebut mendukung bingkai partisipasi yang mengundang pembaca terlibat dalam isu ini dan mendesak KPU untuk bertindak sesuai prinsip demokrasi. Gambar yang digunakan dalam artikel ini yaitu gambar Kaesang Pangarep yang sedang diwawancara yang mendukung gagasan bahwa motif DPR memilih putusan MA dan tolak putusan MK ditujukan untuk memberi jalan pencalonan Kaesang.

Berita ini membingkai bahwa keputusan DPR mengikuti MA dan menolak keputusan MK sebagai langkah kontroversial namun menguntungkan secara politik, terutama untuk Kaesang Pangarep. Pembuatan berita pada media pada dasarnya merupakan sebuah penyusunan berbagai realitas sehingga membentuk wacana yang bermakna (Pamuji, 2019). *Kompas.com* membentuk wacana dengan menyusun realitas bahwa keputusan yang diambil oleh DPR merupakan sebuah upaya untuk membuka jalan untuk Kaesang bisa mencalonkan diri ke Pilkada. *Kompas.com* menggunakan pola framing konflik untuk meningkatkan ketegangan dan memperkuat pengawasan terhadap putusan MK.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ramalinda & Raharja (2024) yang menjelaskan bahwa framing yang menyoroti bahaya dari suatu isu akan memunculkan rasa takut dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aktor atau kelompok politik yang terlibat. Beberapa istilah yang muncul memberi makna ketidakpastian akan hasil putusan ini, seperti digadang-gadang, bisa saja dan seandainya memberikan kesan bahwa pencalonan Kaesang ini belum sepenuhnya pasti, tetapi framing bahwa putusan DPR dibuat untuk memberi jalan kepada Kaesang diperkuat melalui sintaksis yang menyoroti sikap pasif DPR yang memilih mengikuti keputusan MA yang seolah-olah tidak mematuhi hierarki hukum yang benar. Hal ini sejalan dengan teori framing Pan & Kosicki (1993) yang menyatakan bahwa struktur sintaksis dibuat untuk mengalihkan perhatian publik pada aspek tertentu dari isu yang diangkat.

Dalam hal ini, sintaksis menekankan potensi ketidakpatuhan hukum yang dilakukan oleh DPR, sehingga membangun narasi bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kemudian, skrip dalam berita ini yang mengaitkan bahwa keputusan DPR ada potensi untuk mendukung pencalonan Kaesang. Tematik yang menekankan adanya politik dinasti dan retorik yang mencerminkan adanya konflik antara politik dan hukum. Eriyanto (2012) menjelaskan bahwa framing merupakan cara suatu media memilih fakta tertentu dan memberikan makna yang menyoroti aspek yang menimbulkan respon emosional dari publik.

Penelitian Sakti & Nainggolan (2023) juga mendukung hal ini dengan menjelaskan bahwa media berfungsi ganda yakni sebagai pengawas kritis terhadap proses pemilu dan sebagai penyedia informasi yang terpercaya serta akurat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, framing sengaja dimunculkan untuk mengarahkan persepsi publik terhadap legitimasi sebuah keputusan hukum, sekaligus mempertajam kesan bahwa keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasari pertimbangan hukum, tetapi juga ada kepentingan politik tertentu.

## 2. Framing Berita 2 Berjudul Putusan MK Untungkan Gibran Diikuti, yang Rugikan Kaesang Diakali

### a. Sintaksis

Judul berita Untungkan Gibran Diikuti, yang Rugikan Kaesang Diakali menggambarkan bingkai ketidakadilan akan sikap yang tidak konsisten antara dua putusan MK yang berbeda. Kata diakali memiliki makna adanya manipulasi atau kecurangan terhadap proses hukum untuk memfasilitasi kepentingan politik. *Lead* berita Para wakil rakyat lagi-lagi mempertontonkan itu ketika mengubah 180 derajat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang semestinya berlaku final dan mengikat sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat tersebut menyoroti bagaimana parlemen dapat mengubah 180 derajat putusan yang seharusnya sudah final dan mengikat dengan mudah. Latar informasi berupa kutipan dari ahli hukum Bivitri Susanti dan mantan hakim MK menekankan bahwa tindakan DPR membangkang MK dan dibingkai secara negatif sebagai akal-akalan penyimpangan proses hukum.

### b. Skrip

Skrip pada berita 2 secara keseluruhan telah memuat 5W+1H. Berikut analisisnya.

Tabel 4. Analisis skrip pada berita 2

Komponen	Hasil Analisis
Skrip	<p><i>What:</i> DPR menolak putusan MK yang akan merugikan Kaesang.</p> <p><i>Who:</i> DPR, MK, MA, Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming, KPU, I Dewa Gede Palguna, Anwar Usman, Bivitri Susanti, Koalisi Partai Politik.</p> <p><i>Where:</i> Gedung DPR.</p> <p><i>When:</i> 21 Agustus 2024</p> <p><i>Why:</i> DPR memilih putusan MA yang berkemungkinan memfasilitasi pencalonan Kaesang.</p> <p><i>How:</i> DPR mengubah syarat usia calon kepala daerah melalui UU Pilkada Nomor 70/PUU-XXII/2024.</p>

### c. Tematik

Informasi yang disajikan sangat detail dan mendalam, terutama dalam menjelaskan bagaimana dua putusan MK terkait calon usia pemimpin bisa ditanggapi secara berbeda oleh DPR. Narasi berfokus pada perbedaan perlakuan dimana, putusan yang menguntungkan Gibran diikuti dan putusan yang merugikan Kaesang diakali. Narasi ditekankan dengan struktur kalimat yang jelas dan langsung seperti DPR mengubah 180 derajat putusan MK atau logika terkait calon usia pemimpin bisa ditanggapi secara berbeda oleh DPR. Narasi berfokus pada perbedaan perlakuan dimana, putusan yang menguntungkan Gibran diikuti dan putusan yang merugikan Kaesang diakali. Narasi ditekankan dengan struktur kalimat yang jelas dan langsung seperti DPR mengubah 180 derajat putusan MK atau logika hukum bisa dibuat begitu cair. Menunjukkan bingkai konflik akan adanya manipulasi politik. Kata ganti DPR dan partai-partai KIM menyiratkan bahwa keputusan diambil oleh banyak aktor politik dan menunjuk banyak pihak parlemen yang terlibat dalam manipulasi putusan MK ini.

#### **d. Retoris**

Kata yang menunjukkan ketidakpastian dalam berita ini tersirat dalam kalimat Ini merugikan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, yang telah memperoleh lampu hijau dari KIM untuk maju sebagai cawagub Jawa Tengah bersama pensiunan polisi Ahmad Luthfi. Bingkai ketidakpastian lampu hijau dalam kalimat tersebut berarti adanya dukungan atau persetujuan yang tidak sepenuhnya resmi dan kata ini menggambarkan potensi yang belum pasti. Ketidakpastian lainnya ditemukan pada kalimat Di sini lah letak kita bisa mengukur apakah KPU ikut menjadi pembangkang konstitusi atau penjaga konstitusi, ujar Pendiri Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu.

Frasa di sini lah kita bisa mengukur menunjukkan bahwa tindakan KPU masih memerlukan pengukuran dan menggambarkan bingkai partisipasi bagi masyarakat untuk mengawasi KPU akan mengikuti putusan penjaga yang diartikan sebagai MK atau pembangkang yang diartikan sebagai DPR. Penggunaan kata-kata yang menunjukkan bingkai moralitas dalam artikel ini cukup kritis dan memberikan kesan dramatis, seperti akal-akalan, pembangkangan telanjang, mengakali, mengangkangi yang memiliki makna tidak etis tentang tindakan DPR yang dinilai melawan prinsip hukum. Kata-kata kritis juga ditemukan dalam kalimat ini Ketika itu, DPR anteng-anteng saja meskipun kejanggalan putusan itu berserakan di depan mata.

Kata ketika itu menggambarkan saat MK mengabulkan putusan yang meloloskan Gibran maju sebagai cawapres dan saat itu DPR langsung menyetujui putusan yang bahkan janggal dan dibandingkan dengan putusan MK yang merugikan Kaesang, DPR menolaknya dan lebih memilih untuk mengikuti putusan MA. Frasa mengangkangi putusan MK digunakan untuk menekan narasi bahwa DPR berusaha memanipulasi hukum demi kepentingan hukum. Frasa panen raya digunakan untuk menyiratkan makna kemenangan politik dari pihak yang diuntungkan. Frasa lainnya, seperti ditekan secara kilat menunjuk pada putusan MA yang dianggap mendapat tekanan dari para hakim agung yang berakibat putusan diambil secara kilat atau cepat.

Gambar yang digunakan dalam artikel ini yaitu gambar yang memperlihatkan suasana rapat kerja Baleg DPR dan Pemerintah di Gedung DPR RI. Berita ini mbingkai bahwa adanya manipulasi politik yang dilakukan oleh DPR karena tidak konsisten antara dua putusan MK yang berbeda. Penelitian Mufariha & Muyasaroh (2023) menjelaskan pemilihan presiden 2024 juga menjadi sorotan dan memicu perdebatan publik karena munculnya wacana politik dinasti. DPR mengikuti putusan MK menguntungkan Gibran tentang penurunan usia calon presiden dan wakil presiden yang, namun menolak putusan MK karena tidak menyetujui penurunan calon usia calon kepala daerah dinilai telah merugikan Kaesang. Walaupun dimunculkan beberapa narasi yang bermakna ketidakpastian, framing artikel ini diperkuat melalui sintaksis yang menyoroti bagaimana parlemen dapat mengubah 180 derajat putusan yang seharusnya sudah final dan mengikat dengan mudah.

Hal ini sesuai dengan teori framing dari Eriyanto (2012) yang memaparkan bahwa struktur sintaksis digunakan untuk menyoroti aspek tertentu dari sebuah isu guna untuk membentuk opini publik terkait tindakan atau kebijakan tertentu. Skrip berita ini mengaitkan bahwa keputusan DPR ada potensi untuk mendukung pencalonan Kaesang, tematik yang menekankan bagaimana dua putusan MK terkait calon usia pemimpin bisa ditanggapi secara berbeda oleh DPR dan retorik yang menunjukkan narasi bahwa DPR berusaha memanipulasi hukum demi kepentingan hukum. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing melibatkan pemilihan realitas tertentu dan menonjolkannya di struktur tertentu untuk membangun suatu makna.

Dalam hal ini, framing menonjolkan realitas bahwa adanya pembangkangan hukum yang dilakukan secara terang-terangan oleh DPR yang secara tidak langsung



mendukung adanya politik dinasti. Kredibilitas media dalam melaporkan isu-isu hukum dan politik melalui pola framing konflik ini, menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pemilu yang akan datang (Sihite et al., 2024). Ketidakpastian yang dimunculkan *Kompas.com* pada berita ini menunjukkan framing yang negatif terhadap putusan yang dibuat oleh DPR. Framing negatif ditandai dengan penggunaan pilihan kata yang sangat kritis seperti, akal-akalan, pembangkangan telanjang, mengakali, mengangkangi. Kata-kata tersebut memberi makna tindakan tidak etis DPR yang dianggap melawan prinsip hukum.

Sejalan dengan itu Vreese & Boomgarden (2003) mengemukakan bahwa bingkai negatif seperti ini mempunyai kekuatan untuk memengaruhi dukungan publik terhadap suatu isu. O’Keefe & Jensen (2006) juga berpendapat bahwa bingkai negatif memiliki kapasitas yang sangat besar dalam memengaruhi opini dan sikap publik dibanding bingkai netral. Bingkai negatif ini tidak hanya mengarahkan opini publik untuk mempertanyakan dasar keputusan DPR, tetapi juga menciptakan narasi bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip hukum melainkan dipengaruhi kepentingan politik, terutama terkait isu politik dinasti.

### 3. Framing Berita 3 Berjudul DPR Tolak MK Soal Usia Cagub Pilkada 2024, Ternyata Segini Umur Kaesang

#### a. Sintaksis

Judul berita menggunakan kata tolak untuk menunjukkan sikap DPR yang tidak setuju dengan putusan MK, lalu diikuti dengan fokus umur Kaesang. Penggunaan istilah Ternyata segini umur Kaesang langsung menekankan bahwa usia Kaesang merupakan motif perdebatan politik yang terjadi. Lead berita Putusan MK yang dibuat pada Selasa (20/8/2024) membuat Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada karena usianya tidak memenuhi batas usia persyaratan pencalonan kepala daerah. Kalimat ini menyoroti putusan yang diubah akan berdampak pada putra bungsu Presiden Jokowi. Latar informasi dalam berita ini memfokuskan bagaimana DPR menolak putusan MK tentang usia calon kepala daerah. Narasi dibangun untuk memberi informasi bahwa perubahan dilakukan untuk menyelaraskan dengan kondisi umur Kaesang Pangarep.

#### b. Skrip

Skrip pada berita 3 secara keseluruhan telah memuat 5W+1H. Berikut analisisnya.

Tabel 5. Analisis Skrip Pada Berita 3

Komponen	Hasil Analisis
Skrip	<p><i>What:</i> DPR menolak putusan MK soal usia calon kepala daerah.  <i>Who:</i> DPR, MK, MA, Kaesang Pangarep, KPU.  <i>Where:</i> Gedung DPR.  <i>When:</i> 21 Agustus 2024.  <i>Why:</i> DPR lebih memilih putusan MA karena berpotensi menguntungkan kondisi umur Kaesang Pangarep.  <i>How:</i> DPR mengabaikan putusan MK yang kedudukannya lebih tinggi dalam hitungan menit melalui revisi UU Pilkada Nomor 70/PUU-XXII/2024.</p>

#### c. Tematik

Informasi yang disajikan dalam berita ini menekankan perbedaan antara putusan MK dan MA, dengan fokus bagaimana sebuah aturan hukum bisa diubah untuk memfasilitasi kepentingan politik tertentu, terutama pencalonan Kaesang Pangarep. Kalimat dalam artikel ini umumnya kalimat deskriptif, seperti Sementara itu, keputusan

Baleg DPR menolak putusan MK dan menerima putusan MA yang membuat Kaesang bisa maju menjadi calon kepala daerah Pilkada mendatang. Bentuk kalimat ini menggambarkan dengan jelas dampak yang terjadi atas putusan yang akan diambil. Kata ganti kolektif seperti Baleg DPR atau fraksi-fraksi DPR digunakan untuk menunjuk bahwa keputusan yang diambil atas kolektif suara terbanyak.

#### **d. Retoris**

Gaya bahasa yang digunakan dalam berita ini cenderung netral dan informatif, namun dengan sentuhan dramatis di beberapa bagian, seperti kata tolak atau frasa menolak putusan MK dan merujuk putusan MA. Pilihan kata ini memperkuat narasi bahwa adanya tindakan yang akan menguntungkan politik tertentu. Adapun ketidakpastian dimunculkan dua kali dengan kalimat yang hampir mirip, yaitu Sementara itu, keputusan Baleg DPR menolak putusan MK dan menerima putusan MA yang membuat Kaesang bisa maju menjadi calon kepala daerah Pilkada mendatang dan Jika merujuk pada putusan MK soal batas usia calon kepala daerah, Kaesang tidak bisa mencalonkan diri ke Pilkada.

Dua kalimat yang bertentangan tersebut menggambarkan bahwa ada dua jalan hukum yang masih belum pasti mana yang akan dipilih untuk dijalankan, hal tersebut juga menciptakan ambiguitas dalam aturan bagaimana Pilkada yang seharusnya jelas dan konsisten dan memperkuat framing bahwa salah satu putusan akan membuka jalan untuk Kaesang mencalonkan untuk Pilkada. Dua kalimat tersebut juga sekaligus menggambarkan bingkai konflik yang memperlihatkan adanya ketegangan antara jalur hukum yang sah dengan keputusan politik yang memihak. Penggunaan frasa rapat yang terlaksana dalam hitungan menit memiliki makna bahwa keputusan yang diambil tanpa adanya pertimbangan yang mendalam dan memberikan kesan ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah demi suatu keuntungan.

Hal ini menyoroti bingkai akuntabilitas yang mengarahkan pembaca untuk mempertanyakan proses hukum yang terlihat tergesa-gesa. Gambar yang digunakan dalam artikel ini yaitu gambar Kaesang Pangarep yang sedang diwawancara yang mendukung gagasan bahwa motif DPR memilih putusan MA dan tolak putusan MK ditujukan untuk memberi jalan pencalonan Kaesang. Berita ini membingkai bahwa keputusan DPR yang menolak putusan MK tentang usia calon kepala daerah dibuat untuk memberi kesempatan kepada Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024. Melalui perangkat framing seperti pilihan kata, struktur kalimat, berita ini menciptakan makna bahwa adanya motif di balik keputusan politik yang seharusnya netral. Framing putusan MK memiliki alasan politis didalamnya diperkuat melalui sintaksis yang menggunakan beberapa istilah yang menekankan bahwa usia Kaesang merupakan motif perdebatan politik yang terjadi.

Skrip yang menunjukkan mengapa DPR memilih untuk menolak putusan MK. Skrip, menurut teori Pan & Kosicki (1993) merupakan cara media untuk membangun alur logis peristiwa sehingga pembaca memahami hubungan antara elemen dalam berita. Dalam berita ini skrip menekankan bahwa DPR mengabaikan putusan MK karena merugikan Kaesang dan lebih memilih keputusan MA. Tematik pada berita ini menekankan perbedaan antara putusan MK dan MA, dengan fokus bagaimana sebuah aturan hukum bisa diubah untuk memfasilitasi kepentingan politik tertentu dan retorik yang menyorot menggunakan beberapa frasa yang memperkuat narasi bahwa adanya tindakan yang akan menguntungkan politik tertentu.

Semeto & Scammell (2021) berpendapat bahwa jika suatu media terus menerus menekankan sudut pandang tertentu, maka opini dan sikap publik akan ikut terbentuk berdasarkan apa yang dianggap masalah utama bagi media. Media merupakan ruang publik yang berlomba-lomba memberikan pandangan terhadap situasi dan realitas sosial

(Kurniasari & Aji, 2018). Media memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan membentuk suatu realitas yang dianggap masalah utama. Dalam berita, *Kompas.com* terus menerus menyoroti umur Kaesang merupakan motif dalam keputusan DPR, maka publik akan menganggap hal tersebut masalah utama. Media tidak hanya berperan menyampaikan suatu isu, tetapi juga menyampaikan pandangan bagaimana media berpikir tentang isu tersebut (McCombs & Shaw, 1972; Berger et al., 2021). Dengan menyoroti perbedaan keputusan antara MK dan MA, serta menyisipkan narasi yang menyebutkan alasan politis yang bisa saja dimanfaatkan oleh Kaesang, berita ini mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa keputusan DPR yang menolak putusan MK merupakan upaya menguntungkan pihak tertentu. Framing negatif terhadap kebijakan tertentu akan berdampak pada penurunan dukungan publik terhadap kebijakan tersebut (Simamora et al., 2024). Meningkatkan kesadaran publik akan risiko politik dinasti dan mengenalkan nilai-nilai etika politik yang baik, masyarakat akan menciptakan perubahan tata kelola politik adil dan transparan (Rusmana, et al., 2023). Dengan framing negatif inilah publik akhirnya menolak kebijakan yang diusulkan DPR karena akan berdampak negatif dalam jangka yang panjang.

#### 4. Framing Berita 4 Berjudul DPR Anulir Putusan MK Dinilai untuk Buka Jalan Kaesang di Pilkada Jateng

##### a. Sintaksis

Judul berita Anulir Putusan MK dan Buka Jalan Kaesang menekankan bahwa tindakan menolak putusan MK merupakan langkah strategis untuk memanipulasi politik yang menguntungkan satu pihak. Lead berita Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman menyebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sengaja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan revisi UU Pilkada untuk mengakomodir kepentingan segelintir kelompok. Kalimat ini memperkuat narasi bahwa keputusan DPR hanya terfokus untuk kepentingan keluarga Presiden, terutama Kaesang Pangarep, sebagai aktor politik. Kutipan dari pengamat Politik seperti Wahid Abdulrahman sangat penting dalam membingkai bahwa tindakan DPR merupakan langkah politis. Artikel ditutup dengan menganggap keputusan DPR menolak putusan MK sebagai tragedi demokrasi yang akan merugikan masyarakat.

##### b. Skrip

Skrip pada berita 4 secara keseluruhan telah memuat 5W+1H. Berikut analisisnya.

Tabel 6. Analisis Skrip Pada Berita 4

Komponen	Hasil Analisis
Skrip	<p><i>What:</i> DPR mengubah UU Pilkada dan menganulir putusan MK.  <i>Who:</i> Badan Legislasi DPR, Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman, MK, MA, Kaesang Pangarep, KPU, Koalisi Indonesia Maju (KIM).  <i>Where:</i> Gedung DPR.  <i>When:</i> 21 Agustus 2024  <i>Why:</i> Untuk memfasilitasi pencalonan Kaesang Pangarep di Pilkada.  <i>How:</i> DPR merevisi UU Pilkada dan menganulir putusan MK.</p>

##### c. Tematik

Informasi yang disajikan dalam artikel ini berfokus pada argumen yang disampaikan Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman yang menyebut tindakan DPR sebagai tragedi demokrasi dan machiavelis. Kalimat-

kalimat dalam artikel ini bersifat langsung dan menonjolkan argumen, seperti DPR RI menganulir putusan MK soal aturan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah peserta pemilu dan batas usia 30 tahun saat calon kepala daerah mendaftar di KPU. Kalimat ini menunjukkan posisi DPR yang jelas bertentangan dengan MK. Kata ganti sebutan DPR atau mereka menunjukkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan mayoritas, bukan individu.

#### **d. Retoris**

Judul artikel ini yang menggunakan kata dinilai menunjukkan ketidakpastian karena menggambarkan pandangan yang tidak pasti atau bersifat subjektif yang berarti DPR menganulir putusan MK belum pasti ditujukan untuk membuka jalan pencalonan Kaesang. Penggunaan diksi dalam artikel ini cenderung kritis, seperti penggunaan kata anulir dan machiavelis yang menekankan penilaian moral yang negatif terhadap keputusan yang dibuat DPR. Istilah tragedi demokrasi dan menghalalkan segala cara menggambarkan krisis politik dan kemerosotan sistem demokrasi dan memperkuat pesan bahwa keputusan DPR dibuat hanya untuk mencapai tujuan politik tertentu. Penggunaan gaya bahasa yang kritis ini memperkuat bingkai konflik antara prinsip hukum dan kepentingan politik. Berita ini membingkai tindakan DPR tidak hanya politis, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Framing dalam artikel ini sangat kritis terhadap DPR, dengan memfokuskan pada kutipan dari Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman yang menggunakan istilah politik machiavelis dan tragedi demokrasi atas kekecewaannya pada sikap DPR yang menolak putusan MK dan mempertahankan pilihannya untuk merevisi UU Pilkada dan memperkuat kesan bahwa putusannya tersebut merusak demokrasi. Eriyanto (2012) menjelaskan pilihan kata dalam berita sengaja digunakan untuk memberikan suatu makna tertentu. Dalam berita ini penggunaan istilah tragedi demokrasi sengaja disorot untuk membingkai tindakan DPR tidak hanya menyimpang dari sistem hukum, tetapi juga sebagai representasi kegagalan moral.

Nurudin (2021) memaparkan bahwa framing merupakan cara media untuk menyusun fakta agar menghasilkan efek tertentu di benak pembaca. Pemilihan kata, pengulangan narasi dan penggunaan istilah menjadi bagian penting dari framing. Dalam berita ini istilah politik machiavelis dan menghalalkan segala cara menjadi kunci untuk mengarahkan opini publik untuk melihat tindakan DPR dalam citra negatif dan sebagai ancaman terhadap sistem hukum. Media tidak hanya berperan melaporkan peristiwa, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendefinisikan aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Eriyanto, 2002). Dalam berita ini Kaesang didefinisikan sebagai aktor yang menjadi kunci dari narasi peristiwa Kawal Putusan MK ini. *Kompas.com* membingkai bukan hanya sebagai calon kepala daerah, tetapi juga sebagai aktor yang berkaitan erat dengan kepentingan elit politik dan isu politik dinasti.

Dengan menyoroti keputusan DPR yang dianggap hanya untuk menguntungkan posisi Kaesang, *Kompas.com* membangun narasi bahwa pencalonannya bukan hanya langkah politik biasa, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang melibatkan manipulasi hukum dan kepentingan pribadi. Sejalan dengan ini, penelitian Gadafi & Nelwati (2024) menjelaskan bahwa landasan politik harus berkonsep demokrasi dan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau untuk kelompok tertentu. *Kompas.com* memegang peranan penting dalam menyampaikan prinsip tersebut. Penelitian Wattimena & Latuheru (2021) ajang pilkada sangat rentan dengan apa yang disampaikan oleh media karena dapat memengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon pemimpin daerah. Dengan menonjolkan isu negatif seperti manipulasi hukum dan keberpihakan politik tertentu, *Kompas.com* membangun kesadaran masyarakat akan keputusan yang berdampak pada pilkada mendatang.

## 5. Framing Berita 5 Berjudul Kaesang Urus Surat untuk Pilkada pada 20 Agustus, Saat MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah

### a. Sintaksis

Judul berita menyoroti tindakan Kaesang yang mengurus surat-surat untuk mengikuti Pilkada bertepatan dengan keluarnya putusan MK tentang batas usia calon kepala daerah. Kutipan yang digunakan dalam artikel ini Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto yang menunjukkan bahwa benar adanya Kaesang Pangarep sedang mengantisipasi kemungkinan keputusan hukum diubah dan ia bisa maju untuk Pilkada 2024. Artikel ditutup dengan kembali menyoroti konflik antara Badan Legislasi DPR dan keputusan MK, serta menyoroti masyarakat yang menggelar aksi penolakan lantaran politik dinasti dilakukan secara terang-terangan. Bingkai konflik terlihat jelas dalam penulisan berita ini, terutama dengan menekankan konflik antara DPR, MK, Kaesang, serta aksi penolakan masyarakat.

### b. Skrip

Skrip pada berita 5 secara keseluruhan telah memuat 5W+1H. Berikut analisisnya.

Tabel 7. Analisis Skrip Pada Berita 5

Struktur	Hasil Analisis
Skrip	<p><i>What:</i> Kaesang Pangarep mengurus surat-surat sebagai syarat pencalonan Pilkada 2024.</p> <p><i>Who:</i> Kaesang Pangarep, Djuyamto Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, KPU, MK, MK, DPR.</p> <p><i>Where:</i> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p><i>When:</i> 20 Agustus 2024.</p> <p><i>Why:</i> Putusan MK berkemungkinan diubah dan Kaesang bisa maju di Pilkada 2024.</p> <p><i>How:</i> Kaesang mengurus 3 surat, yang terkait dengan persyaratan calon kepala daerah.</p>

### c. Tematik

Informasi yang disajikan dalam berita ini berfokus pada pengurusan administratif yang dilakukan Kaesang Pangarep untuk mengantisipasi dirinya yang berkaitan dengan putusan hukum. Hubungan antarparagraf yang ditulis cukup kuat, mulai dari pengurusan administratif Kaesang, diikuti oleh informasi tentang Baleg DPR yang mengadakan rapat untuk merevisi UU Pilkada dan informasi tentang berhasilnya DPR menganulir MK dengan menolak putusannya dan memilih putusan MA yang setuju bahwa UU Pilkada direvisi. Kata ganti Kaesang dengan Putra Presiden Joko Widodo memperjelas bahwa sangat mungkin DPR memihak Kaesang untuk memanipulasi hukum dan membuka jalan untuk politik dinasti.

### d. Retoris

Penggunaan gaya bahasa dalam artikel ini cenderung netral, tetapi masih mengandung unsur sindiran halus tentang bagaimana Kaesang mengurus surat-surat terjadi bersamaan dengan konflik putusan MK yang menimbulkan kesan bahwa adanya keterkaitan politis. Kata kata seperti putusan, batas usia dan kontroversial menekankan aspek hukum dan politik dari isu yang dibahas yang menggambarkan situasi formal dari proses hukum yang sedang terjadi. Kalimat yang menggambarkan ketidakpastian dalam artikel ini seperti, Putusan kontroversial MA dikaitkan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh Ketua Umum PSI itu yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024.

Dan sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia

berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak. Penggunaan kata kontroversial dan dikaitkan dengan keuntungan menekankan bingkai konflik akan adanya motif di balik putusan politik yang terjadi. Kata yang menggambarkan bingkai ketidakpastian, seperti digadang-gadang dan bisa saja dalam kalimat tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pencalonan Kaesang yang belum pasti. Gambar yang digunakan dalam artikel ini yaitu gambar Kaesang Pangarep yang memperkuat narasi adanya keterkaitan administratif Kaesang dengan putusan MK ini.

Berita ini membingkai keterkaitan administratif Kaesang dengan putusan MK yang dianggap sedang mengantisipasi kemungkinan keputusan hukum diubah dan ia bisa maju untuk mencalonkan diri di Pilkada 2024. Ketidakpastian yang dimunculkan dalam berita ini menyoroti bahwa pencalonan Kaesang masih sangat bergantung pada bagaimana putusan MK. Tanggal pengurusan surat dan putusan MK sangat bertepatan menguatkan framing bahwa Kaesang sudah mempersiapkan administratif untuk mencalonkan dirinya meskipun ada kendala hukum yang masih belum terselesaikan. Berita ini juga membingkai bahwa sangat ada upaya politis yang sedang membuka jalan untuk Kaesang, dengan Badan Legislasi DPR dan MA sebagai peran penting memihaknya.

Menurut Pan & Meng (2018) framing media merupakan salah satu usaha memantau kebijakan pemerintah serta tanggapan masyarakat terhadap tindak lanjut kebijakan tersebut kepada khalayak luas. Dalam isu-isu politik seperti pemilihan umum, kebijakan pemerintah atau skandal politik, media dapat menggunakan framing untuk mendukung atau melemahkan posisi politik tertentu (Zulham et al., 2024). *Kompas.com* secara tidak langsung menggunakan pola framing konflik untuk mengajak masyarakat melemahkan kebijakan pemerintah yang kontroversial. Framing berbasis konflik memiliki potensi besar untuk memperburuk ketegangan sosial yang dapat memicu perpecahan (Gunawan & Wahid, 2021). Protes yang dilakukan masyarakat di banyak kota di Indonesia juga bagian dari framing berita. Kriyantono (2014) menjelaskan bahwa media tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi juga mengarahkan publik pada konflik-konflik tertentu.

Dalam hal ini, framing berita berhasil membentuk suatu persepsi yang dapat dilihat dari tindakan protes yang dilakukan masyarakat menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sikap DPR yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan politik. Cabucci & Maulina (2021) menjelaskan bahwa framing merupakan sebuah strategi untuk mengonstruksi peristiwa menjadi sebuah berita dengan berbagai pertimbangan. Reaksi protes masyarakat menjadi pertimbangan penting untuk media memperkuat narasi akan adanya keberpihakan politik yang dilakukan oleh DPR yang dinilai membuka jalan politik dinasti bagi Kaesang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan mengurus surat-surat yang terkait dengan persyaratan calon Pilkada 2024.

## **Kesimpulan**

Bahasa berperan sangat penting dalam membingkai pemberitaan, khususnya dalam berita politik. Berdasarkan analisis framing lima berita yang diunggah oleh *Kompas.com* dalam kurun waktu 21-23 Agustus, ditemukan bahwa *Kompas.com* menggunakan beberapa istilah yang bermakna ketidakpastian seperti digadang-gadang, bisa saja, seandainya, dinilai, lampu hijau dan angin segar untuk menggambarkan bahwa putusan masih belum final dan masih memiliki banyak potensi hasil. *Kompas.com* memunculkan ketidakpastian agar publik mengawasi proses hukum yang berjalan tidak dimanipulasi hanya untuk kepentingan politik tertentu dengan narasi Kawal Putusan MK. Walaupun ketidakpastian sering memunculkan kesan negatif, hal ini justru dimanfaatkan media untuk membuka ruang diskusi dan transparansi terkait dengan isu yang sedang

berlangsung. Aksi protes publik juga memperkuat framing dalam menciptakan narasi negatif terhadap keputusan yang dibuat DPR maupun proses administratif yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep. *Kompas.com* juga membingkai bahwa sangat ada upaya politik yang sedang membukakan jalan untuk Kaesang, dengan Badan Legislasi DPR dan MA sebagai peran penting memihaknya. Framing yang dimunculkan dalam kelima berita memberikan kesan bahwa keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didasari pertimbangan hukum, tetapi juga ada kepentingan politik tertentu. Framing juga menonjolkan realitas bahwa adanya pembangkangan hukum yang dilakukan secara terang-terangan oleh DPR yang secara tidak langsung mendukung adanya politik dinasti.

### Daftar Pustaka

- Berger, C. R., Roloff, M. E., & Ewoldsen, D. R. R. (2021). *Efek Media Massa: Handbook Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Bustam, R. M. (2020). Ambiguitas Struktural Pada Heading Portal Berita The Jakarta Post Dalam Pemberitaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat. *Diglossia*, 11(2), 55-66.
- Cabucci, M. O., & Maulina, P. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. Agro Sinergi Nusantara Pada Media Online Lokal Dan Nasional. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 5(2), 205-216.
- De, C. H. V., & Boomgarden, H. G. (2003). Valenced News Frame and Public Support for the EU: Linking Content Analysis and Experimental Data. *The European Journal of Communication*, 261-281.
- Dwinarko, M. M. (2022). *Kontruksi Sosial Aktor Media Massa*. Surabaya: CV Bintang Semesta Media.
- Dzulfikar, A., Prinsato, G. F., Ernungtyas, N. F., & Putri, S. A. (2021). Bingkai Sara dalam Berita Politik: Analisis Framing Berita Pengangkatan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 40-53.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
- Entman, R. M. (2003). Cascading Activation: Contesting The White House's Frame After 9/11. *Political Communication*, 20(4), 415-432.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto, D. R. M. S. I. (2022). *Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Febriyanti, Z., & Karina, N. N. (2021). Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020: Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan-Gerald M Kosicki. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 146-155.
- Ganafi, K., & Nelwati, S. (2024). Dampak Politik Dinasti Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Journal Innovation in Education*, 2(3), 133-148.
- Gunawan, R., & Wahid, U. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Habib Rizieq Shihab Selama di RS Bogor terkait Hasil Swab Tes. *Jurnal Komunikasi*, 15(1), 71-82.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kurniasari, N., & Aji, G. G. (2018). Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(1), 96-116.

- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Mufariha, & Muyasaroh, S. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Politik Mengenai Hak Angket Pasca Pilpres di Media Online Kompas.com dan CNN Indonesia Periode Februari-Maret 2024. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 7(1), 16-26.
- Newton, K., & Deth, J. W. V. (2023). *Seri Perbandingan Sistem Politik: Tentang Media Massa*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Nurudin. (2021). *Pengantar Jurnalistik: Memahami Teknik Praktis dan Teori Jurnalistik*. Depok: Rajawali Pers.
- O'Keefe, D. J., & Jensen, J. D. (2006). The Advantages of Compliance or the Disadvantages of Noncompliance? A Meta Analysis Review of the Relative Persuasive Effectiveness of Gain-Framed and Loss-Framed Messages. *Communication Yearbook*, 59(2), 1-43.
- Pamuji, E. (2019). *Media Cetak vs Media Massa (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa)*. Surabaya: Unitomo Press.
- Pan, P. L., & Meng, J. (2016). Media Frames across Stages of Health Crisis: A Crisis Management Approach to News Coverage of Flu Pandemic. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 24(2), 95-106.
- Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing Analysis: An Approach to News Discourse. *Political Communication*, 10(1), 55-75.
- Ramalinda, D., & Raharja, A. R. (2024). Strategi Perlindungan Data Menggunakan Sistem Kriptografi Dalam Keamanan Informasi. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 665-671.
- Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantiono, C. I., & Vici, V. (2023). Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1-25.
- Sakti, R. E., & Nainggolan, B. (2023). Understanding the Role of Social Media Toward Satisfaction of Government in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(1), 154-170.
- Sarihati, T., Luthfie, M., & Kurniadi, B. (2019). *Komunikasi Politik, Media Massa dan Opini Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Semetko, H. A., & Scammell, M. (2021). *Penelitian Peningkatan Berita: Handbook Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Sihite, A. S., Sijabat, N. V., & Rohma, P. N. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Media Online *cnnindonesia.com* dan *kompas.com* Terhadap Kasus Sidang Mahkamah Konstitusi, Bawaslu DKI Mengenai Pelanggaran Pemilu 2024. *Journal of Southeast Asian Communication*, 5(2), 63-73.
- Simamora, A. J., Albart, N., Fitri, S. A., & Mulatsih, L. S. (2024). Managerial Ability And Earnings Management: Moderating Role Of Risk-Taking Behavior. *Jurnal Akuntansi*, 28(2), 357-379.
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Symbolik dan Analisis Framing*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Wattimena, D., & Latuheru, R. (2021). Analisis Framing: Pemberitaan Kampanye Tiga Pasangan Calon Pilkada Maluku Periode Tahun 2018-2023 pada INews TV Ambon. *Kamboti: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 16-25.
- Wulandari, D. (2021). *Media Massa dan Komunikasi*. Jakarta: Mutiara Aksara.